

**Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan
Belanja Bantuan Sosial Terhadap Penduduk Miskin
di Kota-Kota Sumatera Selatan**



Skripsi

Farros Syahiroh

01021381621210

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

TAHUN 2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, BELANJA MODAL DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI
KOTA-KOTA SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Farros Syahiroh
NIM : 01021381621210
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua,



Tanggal : 10 Desember 2020

Drs. H. Nazeli Adnan, M.Si
NIP. 195804171988101002

Anggota,



Tanggal : 07 Desember 2020

Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, BELANJA MODAL DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI KOTA-KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Farros Syahiroh
NIM : 01021381621210
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian, Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 11 Januari 2021

Ketua

Anggota

Anggota

Drs. H. Nazeli Adnan, M.Si
NIP : 195804171988101002

Imelda, S.E., M.S.E
NIP : 197703092009122002

Dr. Siti Rohims, S.E., M.Si
NIP : 196903142014092001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhtis, S.E., M.Si
NIP : 197304062010121001

ASLI

FAK. EK. PEMBANGUNAN 23-02-2021
REKAMAS EKONOMI UNSI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farros Syahiroh
NIM : 01021381621210
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan”.

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Nazeli Adnan, M.Si
Anggota : Imelda, S.E., M.S.E
Tanggal Ujian : 11 Januari 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dari gelar kesarjanaan.

Palembang, 11 Januari 2021

Pembuat Pernyataan



Farros Syahiroh

NIM. 01021381621210

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merasa bahwa dalam menyusun skripsi ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Palembang, 23 Januari 2021



Farros Syahiroh

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO, KESAN DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	,xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Kemiskinan	7
2.1.2 Penduduk Miskin.....	8

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	13
2.1.4 Belanja Modal.....	17
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial.....	20
2.1.6 Dana Alokasi Khusus.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pikir.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3 Teknik Analisis.....	34
3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel.....	36
3.3.2 Pemilihan Model Terbaik.....	36
3.4 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.4.1 Uji Normalitas Data.....	37
3.4.2 Uji Multikolinieritas.....	38
3.4.3 Uji Heterokedastisitas.....	38
3.4.4 Uji Autokorelasi.....	39
3.5 Uji Statistik.....	40
3.5.1 Uji Secara Bersama-sama (Uji F).....	40
3.5.2 Uji Secara Individual (Uji t).....	40
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Perkembangan Penduduk Miskin	42
4.1.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)	46
4.1.3 Perkembangan Belanja Modal.....	48
4.1.4 Perkembang Belanja Bantuan Sosial.....	51
4.2 Pemilihan Model Regresi.....	53
4.2.1 Estimasi Menggunakan <i>Common Effect Models</i>	54
4.2.2 Estimasi Menggunakan <i>Fixed Effect Models</i>	55
4.2.3 Estimasi Menggunakan <i>Random Effect Models</i>	56
4.3 Pengujian Model Regresi Terbaik.....	57
4.3.1 Uji Chow.....	57
4.3.2 Uji Hausmen	57
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	58
4.4.1 Uji Normalitas	58
4.4.2 Uji Autokorelasi.....	59
4.4.3 Uji Multikolinieritas	60
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas	60
4.5 Hasil Uji Statistik	61
4.5.1 Uji Secara Bersama-Sama (Uji F)	61
4.5.2 Uji Secara Individual (Uji t)	62
4.6 Pembahasan.....	63
4.6.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Penduduk Miskin.....	63

4.6.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penduduk Miskin	64
4.6.3 Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Penduduk Miskin	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.1 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Miskin.....	43
Tabel 4.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus.....	46
Tabel 4.3 Perkembangan Belanja Modal.....	48
Tabel 4.4 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial.....	51
Tabel 4.5 Hasil Regresi Metode <i>Common Effect</i>	54
Tabel 4.6 Hasil Regresi Metode <i>Fixed Effect</i>	55
Tabel 4.7 Hasil Regresi Metode <i>Random Effect</i>	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Hausmen.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Dana Alokasi Khusus di Kota-Kota Sumatera Selatan.....	3
Gambar 1.3 Jumlah Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.....	4
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Versi Nurkse.....	8
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

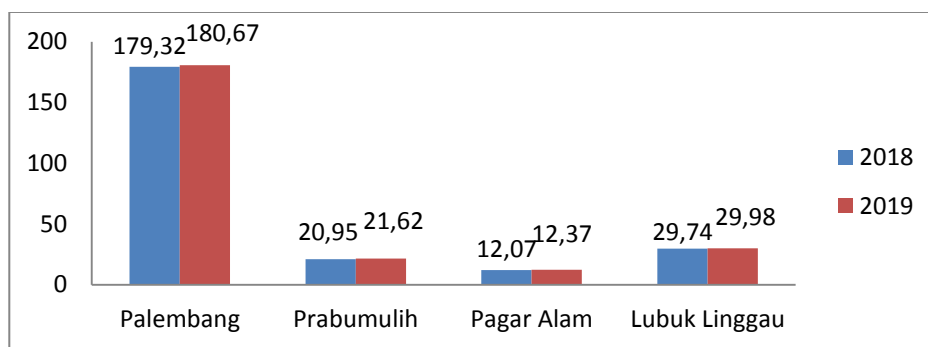
Salah satu tujuan dalam pembangunan nasional di Indonesia yaitu meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak untuk seluruh rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dan menurunkan jumlah penduduk miskin karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi (Ishak, 2017:55). Kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat untuk memenuhi baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder serta rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi dan harus segera dituntaskan agar pembangunan nasional dapat terlaksana (Pratama, 2015:211). Suatu negara atau daerah dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019:10) pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 25,144 juta jiwa atau 9,41 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 25,949 juta jiwa atau 9,82 persen. Jumlah penduduk miskin yang menurun disebabkan oleh adanya program dari pemerintah seperti bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu

Indonesia Sehat (KIS) dan berbagai kebijakan lainnya (TNP2K, 2018:2). Dengan menurunnya penduduk miskin berarti berkurang pula tingkat kemiskinannya. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang belum sepenuhnya berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Ini terlihat dari jumlah penduduk miskin yang masih mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 yang tersebar di wilayah perkotaan yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau (BPS, 2019:11). Semakin tinggi jumlah penduduk miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan maka beban pembangunan akan menjadi tinggi. Oleh karena itu pembangunan dikatakan berhasil apabila jumlah penduduk miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan semakin sedikit.



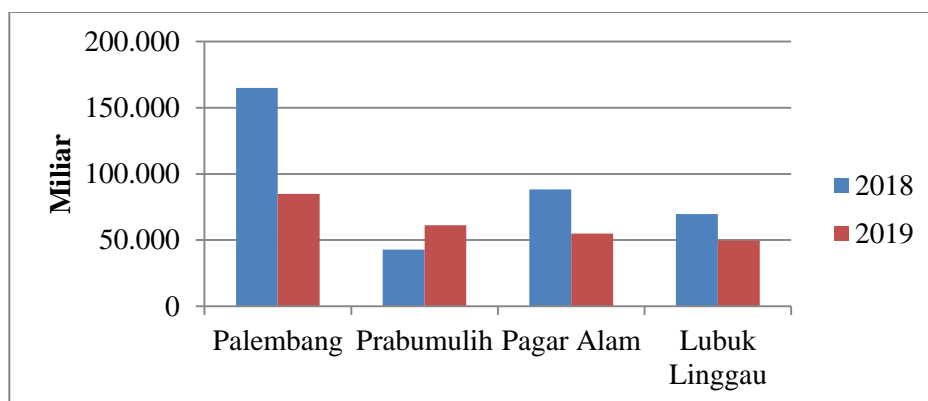
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2019 (Data Diolah)

Untuk mengatasi penduduk miskin pemerintah telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu kebijakan pengalihan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan adanya transfer fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan penyediaan pelayanan

sektor publik di daerah agar dicapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Bjornestad, 2009:6), sehingga penduduk miskin akan berkurang.

Bentuk komitmen pemerintah pusat dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah mengalokasikan anggaran transfer fiskal ke daerah, salah satunya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Qomariyah, *et al* (2017:166) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer fiskal berupa *conditional transfer* yang dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi prioritas nasional. Jumlah dana alokasi khusus di kota-kota Sumatera Selatan yang digunakan dalam kegiatan pendanaan pembangunan dari tahun ke tahun tidak tetap. Pada tahun 2019 Kota Palembang menerima dana cukup besar yaitu sebesar Rp. 84.839 miliar sedangkan Kota Lubuk Linggau menerima dana paling kecil dibandingkan dengan kota lainnya (BPS, 2019:254).



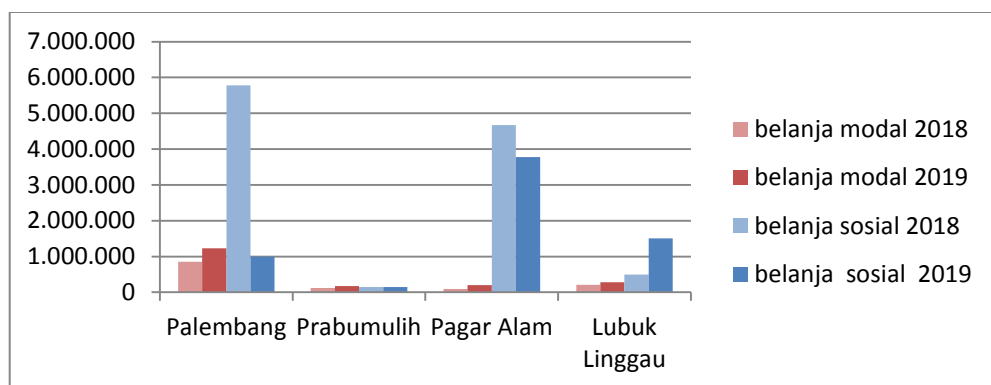
Gambar 1.2 Jumlah Dana Alokasi Khusus di Kota-Kota Sumatera Selatan

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2019 (Data Diolah)

Apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan maka kualitas sarana dan prasarana fisik daerah meningkat dan diharapkan dapat berdampak langsung dalam menurunkan kemiskinan atau penduduk miskin. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Paulus, *et al* (2015) bahwa Dana Alokasi Khusus

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Maksudnya apabila peningkatan pengeluaran penyediaan Dana Alokasi Khusus, maka penduduk miskin mengalami penurunan.

Sementara itu peranan pemerintah Sumatera Selatan dalam mengurangi penduduk miskin tercermin juga dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya baik dalam sisi belanja modal maupun belanja bantuan sosial. Jika belanja modal dan belanja bantuan sosial disalurkan tepat sasaran dan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka diharapkan mampu mengurangi penduduk miskin. Kondisi belanja modal di Kota-Kota Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019 namun untuk belanja bantuan sosial hanya Kota Lubuk Linggau yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019 (BPS, 2019:255).



Gambar 1.3 Jumlah Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial di Kota-Kota Sumatera Selatan

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2019 (Data Diolah)

Semakin besar belanja daerah melalui belanja modal dan belanja bantuan sosial diharapkan akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya dapat mengurangi penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini selaras

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sendouw, *et al* (2017) yang mengatakan belanja modal berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Penelitian Mufliha (2016) menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Artinya dengan meningkatnya pengeluaran belanja modal dan belanja bantuan soisal maka dapat menurunkan kemiskinan atau penduduk miskin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat karya dalam bentuk tulisan dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum Penduduk Miskin, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial di Kota-Kota Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran umum dari Penduduk Miskin, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial di Kota-Kota Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi ilmiah dan pertimbangan bagi pihak yang terkait serta bagi peneliti sebagai bahan perbandingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Peneliti menjadi lebih memahami pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Penduduk Miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan.

- b. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak pemerintah atau yang terkait dalam mengambil kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan penduduk miskin di Kota-Kota Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M., Juanda, B., Firdaus, M., & Hakim, D. B. (2020). *The Impact of Special Autonomy Funds on Poverty of Human Development and Unemployment in Aceh. IJICC, 12(10), 713–734.*
- Ariawaty, R. N., & Evita, S. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis*. Bandung: Bima Pratama Sejahtera.
- Asoka, R. (2019). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR), 2(2), 76–91.*
- Astuti, P. B. (2013). Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 12(2).*
- Azwardi. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Serta Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin. *Journal of Economic & Development, 12(1), 1–11.*
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://bps.go.id>.

- Baihaqi, & Khotimah, H. (2009). Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Bagian Selatan. *JMK*, 7(3), 1–27.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bjornestad, L. (2009). *Fiscal Decentralization, Fiscal Incentives, and Pro-Poor Outcomes: Evidence From Viet Nam*.
- Caraka, R. E. & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*. Yogyakarta: Wade Group.
- Dumairy. (2007). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Egi, F. (2013). *Panel Data Analysis Using Eviews*. Self Publish E-book.
- Elman. (2019). Garis Kemiskinan Prabumulih Tertinggi Se-Sumsel, Bahkan Kalahkan Jakarta Barat. Retrieved November 19, 2020, from sumsel.tribunnews.com: <https://sumsel.tribunnews.com/garis-kemiskinan-prabumulih-tertinggi-se-sumsel-bahkan-kalahkan-jakarta-barat>.
- Fikri, R. A. (2013). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *None*, 1(1).
- Hakim, A., & Ismail, A. (2014). Feran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali, *16*(9), 2168–2186.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hasan, T. I. Ben, & Zikriah. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh, *1*(1).
- Herman. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Equilibrium*, 6(2), 161–169.
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Deepublish.
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. S. (2019). *Effects of Capital Expenditures , Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. Jambura Equilibrium Journal*, 1(1), 23–30.
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 55. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i1.212>

- Kaligis, E., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2017). *Effect Capital Expenditure On Poverty in North Minahasa Through Economic Growth as Intervening Variables*. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 94–105.
- Khasanah, M., & Wibowo, P. A. (2016). *The Influence Between Government Expenditure Towards Poor Resident in Indonesia*, 5(1), 16–22.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Linggaupos.co.id. (2018). Jumlah Penduduk Miskin Menurun. Retrieved November 19, 2020, <https://www.linggaupos.co.id/jumlah-penduduk-miskin-menurun>
- Lubis, M. S. (2019). Angka Kemiskinan di Sumsel dalam 6 Bulan Menurun. Retrieved November 21, 2020, from sumatera.bisnis.com: <https://sumatra.bisnis.com/read/20190716/533/1125065/angka-kemiskinan-di-sumsel-dalam-6-bulan-menurun>
- Mahkamah Agung. (2017). *Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lubuk Linggau*, Mahkamah Agung Lubuk Linggau.
- Manek, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1–24.
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marsoit, C. M. S., Koleangan, R., & Tumilaar, R. (2012). Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kota Manado.
- Marwa, T., Sukarman, R., & Husin, T. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Human Development*, 10(1), 61–78.
- Metrosumatera.com. (2017). Harga Karet Anjlok, Angka Kemiskinan Meningkat. Retrieved November 21, 2020, <http://www.metrosumatera.com/harga-karet-anjlok-angka-kemiskinan-meningkat>.
- Minggu, T. D., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).

- Miranti, J., Supriyanto, S., & Sair, A. (2019). Analisis Perkembangan Kota Pagar Alam Masa Walikota Ida Fitriati Tahun 2013-2017. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 201–219.
- Mulyanto, S., & Evers, H.-D. (1995). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2014). Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014. *JEA17*, 3(2), 9–18.
- Nurhasanah, S. (2016). *Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.
- Nwosa, P. I. (2014). *Government Expenditure, Unemployment and Poverty Rates in Nigeria*, 12(1), 77–84.
- Oktaviani.J. (2018). Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. *KSAP*, 51(1), 51.
- Omari, L. V, & Muturi, W. (2016). *The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya*, 7(8), 219–242.
- Osundina, C. K. (2014). *Disaggregated Government Spending on Infrastructure and Poverty Reduction in Nigeria*, 14(5).
- Owuru, J. E., & Farayibi, A. O. (2016). *Examining the Fiscal Policy-Poverty Reduction Nexus in Nigeria*, (9).
- Palpos.id. (2019). Warga Miskin di Kota Palembang Meningkat. Retrieved November 19, 2020, <https://palpos.id/2019/12/11/warga-miskin-di-kota-palembang-meningkat>
- Parbinoto, A. G. (2018). Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur. *Defis*, 3, 31–46.
- Paulus, Dewi I, S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2015). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung, 19(2), 1–18.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Belanja Bantuan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Perdana, E. (2016). *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Pangkal Pinang: Lab Kom Manajemen Fe Ubb.
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Qomariyah, N., Suharno, & Priyarsono, D. (2017). Dampak Transfer Fiskal Terhadap Pembangunan Pertanian, Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia. *JSE*, 6(2), 164–173.
- Rarun, C. C. E., Kawung, G. M. V, Niode, A. O. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 91–102.
- Bappeda Kota Prabumulih. *Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Tahun 2019*
- Bappeda Kota Palembang. *Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Tahun 2019*
- Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A. K. (2020). Reduksi Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Society*, 8(2), 581–595. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215>
- Rondinelli, D. A. (1990). *Development Project as Policy Experiments*. New York: Routledge.
- Sari, I. N., & Suparta, I. M. (2017). Dampak berdirinya pasar modern terhadap pertumbuhan ekonomi. *JEB*, 2(1), 385–401.
- Sembiring, B. P. (2019). Ada Kemungkinan Suplier BNPT di Lubuk Linggau Masih dari Bulog. Retrieved December 7, 2020, from silamparimedia.id: <https://www.silamparimedia.id/pedoman-media-siber/>
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *JPE*, 19(2), 1–15.
- Sherraden, M. (2006). *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengantasan Kemiskinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sidik et al. (2004). *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah*. Malang: Dioma.
- Sugiyono. (2015). *Statistik Nonparametris*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjoko, I. (2018). Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output. *Defis*, 3(3), 1–97.
- Suparmoko. (2003). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* (Edisi ke-5). Yogyakarta: BPF.
- Susanti, E. N., & Sartiyah. (2019). *Determinants Of Poverty In The Riau Islands Province*, 8(2), 249–265.
- Swarna.co.id. (2019). Pasca Asian Games Kemiskinan Palembang Turun.
- Tiara, R., & Mardianto. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Demography Journal of Sriwijaya*, 3(1), 37–46.
- TNP2K. (2018). *Program Bantuan Pemerintah Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Retrieved from website TNP2K (www.tnp2k.go.id)
- Tribunsumsel.com. (2019). 164 Warga Miskin Pagaram Dibangunkan Rumah Baru Melalui Program BSPS. Retrieved November 19, 2020, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/10/08/164-warga-miskin-pagaralam-dibangunkan-rumah-baru-melalui-program-bsps-ini-persyaratannya>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widianto, A., Utami, E. U. S., & Nurmansyah, A. L. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal), 5(2), 170–176.
- Yustie, R., & Heriqbaldi, U. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *JEB*, (1), 7–16.
- Zakaria. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Pontianak, 4(4).